

**KAJIAN YURIDIS PASAL 1868 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Jo. PASAL 38
UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS TERHADAP
PEMASANGAN BARCODE PADA AKTA AUTENTIK NOTARIS
BAHTERA TEGUH ANANDA, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS GADJAH MADA, 2018. Diunduh dari <http://id.repo.ugm.ac.id/>**

**KAJIAN YURIDIS PASAL 1868 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Jo. PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PEMASANGAN
BARCODE PADA AKTA AUTENTIK NOTARIS**

Bahtera Teguh Ananda¹, Ninik Darmini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemasangan *barcode* pada autentisitas akta Notaris yang sudah ditentukan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan pemasangan *barcode* yang dilekatkan pada akta autentik Notaris terkait keamanan atas kerahasiaan informasi akta autentik.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber data. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat eksploratoris (*explorative research*), penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Kadang-kadang penelitian semacam itu disebut *feasibility study* yang bermaksud untuk memperoleh data awal.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah secara normatif dan yuridis pemasangan *barcode* pada akta autentik disetiap halaman akta Notaris telah mempengaruhi bentuk lahiriah akta autentik pada umumnya yang sudah ditentukan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, karena keberadaan simbol kotak *barcode* disetiap halaman akta Notaris, sehingga berimplikasi pada pelanggaran keautentikan akta secara bentuk formalnya. Bentuk perlindungan pemasangan *barcode* pada akta Notaris berupa penanda khusus yang berbentuk *barcode* berjenis *QR Code* yang dipasang disetiap lembar halaman akta yang berfungsi sebagai akses informasi mengenai keterangan akta yang dilekati *barcode* yang disimpan dalam sistem *data base barcode*. Apabila seorang Notaris atau pihak yang berkepentingan pada akta ingin melakukan pengecekan mengenai keaslian akta yang dilekati *barcode* maka tinggal melakukan *scan barcode* tersebut dengan *smartphone* yang dimilikinya.

Kata Kunci : Akta Autentik Notaris, Pemasangan Barcode, QR Code.

¹ Perumahan Satelit, RT/RW 004/004, Jalan Aries 17, Kelurahan Pabian, Kota Sumenep, Madura.

² Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KAJIAN YURIDIS PASAL 1868 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Jo. PASAL 38
UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS TERHADAP
PEMASANGAN BARCODE PADA AKTA AUTENTIK NOTARIS
BAHTERA TEGUH ANANDA, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
JURIS STUDY ARTICLE 1868 OF THE INDOONESIAN CIVIL CODE Jo. ARTICLE
38 OF ACT NUMBER 2 YEAR 2014 CONCERNING AMENDMENT TO ACT
NUMBER 30 YEAR 2004 ABOUT THE NOTARY'S POSITION
ABOUT BARCODE INSTALLATION BARCODE ON
NOTARY'S AUTHENTIC DEED**

Bahtera Teguh Ananda³, Ninik Darmini⁴

ABSTRACT

This study aims to understand and analyze barcode's influence on the authenticity of Notarial deeds that have been determined by Article 1868 of the Indonesian Civil Code Jo. Article 38 of Act Number 2 Year 2014 concerning Amendments to Act Number 30 Year 2004 concerning Notary's Position, in addition to understanding and analyzing the protection forms of barcode installed to the Notary's authentic deed related to the safety of confidentiality authentic deed's information.

This research is a normative legal research with secondary data as a data source. Normative legal research method is a scientific research procedure that finding truth based on legal scientific logic from the normative side. Normative legal research is also called doctrinaire law research, library research or document study. This research was conducted on written rules or other law materials related to the said problem. This research is included exploratory research. Exploratory research is used when the knowledge that will be studied is still little or even non-exist. Sometimes such research is called a feasibility study intended to obtain preliminary data.

The results obtained in this research normatively and juridically are the barcode installed to the authentic deed on each page of the notary's deed has influenced the physical form of authentic deeds in general determined by Article 1868 of the Indonesian Civil Code Jo. Article 38 of Act Number 2 Year 2014 concerning Amendments to Act Number 30 Year 2004 concerning Notary's Position, due to the existence of barcode symbols on each page of the notarial deed, which has implication of authentic deed's violations in the formal form. The protection forms of barcode installed to the Notarial deed in the form of special markers originating barcode form type QR Code in each page of the deed. It has function as information access about the installed barcode's deed stored in the barcode database system. If a Notary or party is interested into checking the authenticity of the installed barcode's deed, then just scan the barcode with his/her smartphone.

Keywords: Notary's Authentic Deed, Barcode Installation, QR Code.

³ Perumahan Satelit, RT/RW 004/004, Jalan Aries 17, Kelurahan Pabian, Kota Sumenep, Madura.

⁴ Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta.